

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pesantren merupakan sebuah lembaga pendidikan kuno yang mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan agama yang memiliki ciri khas tersendiri. Pesantren telah berdiri jauh sebelum negara Republik Indonesia merdeka sehingga menjadikan pesantren sebuah lembaga pendidikan tertua di Indonesia. Dalam kehidupan pesantren tidaklah hanya berfokus pada pengajaran yang bersifat kaku, terdapat banyak ilmu-ilmu sosial yang dipelajari dan diajarkan dalam pesantren.

Pondok Pesantren Miftahul Huda merupakan pondok pesantren yang berlokasi di Kabupaten Tasikmalaya yang berdiri sejak 07 Agustus 1967. Pendiri Pondok pesantren ini ialah KH. Choer Affandy atau dikenal dengan Uwa Ajengan beserta istrinya yang bernama Hj. Siti Shofiyah, Pondok pesantren ini berbasis salafiyah tetapi dalam metode pembelajarannya mengadopsi sistem pembelajaran modern. Pesantren Miftahul Huda saat ini dipimpin oleh putra dari Alm. KH. Choer Affandy yakni KH. Asep Ahmad Maoshul Affandy. Dalam sistem pembelajaran di Pesantren Miftahul Huda Manonjaya menggunakan sistem pendidikan berjenjang dan tersruktur dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan pesantren. Tingkatan pendidikan atau yang disebut muadalah terdiri dari tiga tingkatan, yakni Ibtida, Tsanawy dan Ma'had 'Aly. Ketiga tingkatan tersebut memiliki kesetaraan dalam pendidikan formal karena terdapat tahapan

yang meski ditempuh, pada tingkatan Ibtida setara dengan SLTP dan pada tingkatan Tsanawy setara dengan SLTA yang masing-masing tingkatan terbagi dalam tiga kelas, yaitu kelas 1, kelas 2, kelas 3 serta pada tingkatan Ma'had 'Aly setara dengan perguruan tinggi yang menitikberatkan pada praktik mengajar dan mengurus keorganisasian pesantren (Adeng, 2011).

Pesantren dan politik merupakan dua elemen berbeda yang tidak dapat disatukan karena memiliki perbedaan pandangan serta tujuan. Pesantren dikenal masyarakat sebagai lembaga pendidikan yang menanamkan nilai-nilai agama dan kehidupan. Sebaliknya politik dikenal oleh masyarakat sebagai sebuah upaya yang dilakukan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik (Budiarjo, 2008:13). Asumsi masyarakat tentunya tidak dapat menjadi tolak ukur terhadap realitas yang terjadi. Pesantren dan politik meskipun tidak dapat bersatu tetapi dapat berjalan beriringan, hal ini didasarkan pada perkembangan demokrasi di Indonesia. Pesantren saat ini memberikan peran dalam perkembangan negara, didukung dengan terlahirnya beberapa jenis pesantren yang ada di Indonesia, sehingga pesantren dan politik dapat bersama-sama mengambil perannya masing-masing untuk kepentingan bangsa dan negara.

Berdasarkan pada catatan sejarah, pesantren Miftahul Huda Manonjaya yang didirikan oleh K.H Khoer Affandy pada awalnya tidak tertarik pada politik, bahkan pada awalnya mengkritisi atas ketidaknyamanannya pada politik. Tetapi, seiring dengan berjalannya waktu ketidaknyamanannya pada politik kini telah berubah menjadi terbuka pada politik, tepatnya setelah masa reformasi. Keterbukaan ini terjadi setelah terlibatnya pesantren dalam pergolakan politik di

Indonesia karena pesantren memiliki posisi strategis dalam menarik perhatian masyarakat sehingga pesantren Miftahul Huda tidak lagi menganggap politik sebagai hal tabu atau sesuatu yang perlu dihindari.

KH. Asep Affandy merupakan pimpinan pesantren Miftahul Huda hingga saat ini yang juga merupakan seorang politisi dari Partai Persatuan Pembangunan yang saat ini menjabat sebagai anggota DPR RI. Di bawah pimpinan K.H Asep Affandy pondok pesantren Miftahul Huda memiliki corak pesantren yang berbeda dengan pesantren lainnya. Sistem pendidikan modern dengan perpaduan basis salafi menjadi ciri khas dari pesantren Miftahul Huda. Keterlibatan pimpinan pesantren dalam pemerintahan tentunya dapat memberikan pengaruh kepada berbagai elemen salah satunya adalah santri dari pondok pesantren tersebut. Seorang yang telah masuk dalam pemerintahan tentu memiliki tugas serta peran yang perlu dipenuhi sebagai seorang yang menduduki dalam pemerintahan, jika seorang kiai atau pimpinan pesantren masuk dalam pemerintahan maka kiai tersebut memiliki peran dan tugas ganda dalam menjalaninya, meskipun keduanya dapat terlaksana dengan baik. Terdapat pandangan bahwa keterlibatan kiai atau pimpinan pesantren dalam politik telah menjadi bagian dalam sejarah politik Indonesia yang tidak dapat dipisahkan karena kiai atau ulama merupakan pewaris para Nabi. Keterikatan kiai tidak hanya dalam persoalan agama saja tapi dalam persoalan duniawi termasuk persoalan politik, hal ini didukung dengan sering dilibatkannya kiai atau ahli agama dalam pemerintahan karena kapasitas yang dimilikinya (Irfan, 2023:62).

Terdapat istilah yang menarik yang terkenal dalam pesantren, yakni: “Sami’na Wa ‘Atho’na” atau secara harfiah berarti “kami mendengar dan kami

taat”, istilah tersebut diterapkan dalam pesantren karena kiai atau pimpinan pesantren merupakan sosok pemimpin yang dipanuti serta dipatuhi oleh santrinya. Perintah yang disampaikan oleh Kiai sudah semestinya dipatuhi karena itu merupakan bagian dari khidmat kepada guru. Kiai dan santri memiliki hubungan secara spiritual yang tidak dapat dipisahkan, pun secara emosional antara kiai dan santri memiliki kesamaan karena kesehariannya dalam lingkup yang sama. Salah satu unsur dalam pesantren ialah Kiai yang juga memiliki posisi sentral, kiai memiliki tanggung jawab besar karena merupakan seorang pemimpin suatu pesantren. Peran Kiai dalam pesantren sangatlah penting karena kiai merupakan seorang yang selalu berinteraksi dengan santri-santrinya. Dalam sebuah penelitian yang berjudul “Partisipasi politik santri pondok pesantren Al Luqmaniyyah dalam pasangan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin pada pilpres tahun 2019” dijelaskan bahwa Kiai didefinisikan sebagai sosok yang dipandang memiliki kapasitas, kredibilitas, kapabilitas serta akseptabilitas. Sehingga dapat menjelaskan bahwa kiai memiliki peranan serta pengaruh yang kuat serta dapat melegitimasi secara sosial maupun secara politik terhadap masyarakat (Pasa & Marzuki, 2021).

Keterlibatan KH. Asep Affandy pesantren dalam politik melahirkan asumsi serta stigma dalam masyarakat yang didasarkan pada peran Kiai yakni untuk menanamkan nilai-nilai agama kepada santri serta masyarakat. Dinamika yang terjadi dalam masyarakat menyatakan bahwa seorang kiai atau ahli agama tidak dianjurkan masuk dalam politik praktis masih menjadi perdebatan sampai saat ini karena belum adanya kesamaan pemahaman serta cara pandang mengenai keterlibatan kiai atau ulama dalam politik praktis. Dalam perspektif kemaslahatan,

memang dengan terlibatnya kiai dalam politik dapat memberikan dampak yang cukup baik terutama dalam pemenuhan keperluan penunjang pondok pesantren. Selain itu juga, kegiatan-kegiatan pesantren dapat terbantu dan berjalan baik dengan adanya relasi yang terbangun. Tetapi, dalam perspektif kemudharatan terlibatnya kiai dalam politik praktis tentunya dapat memberikan dampak yang kurang baik terhadap citra kiai serta pesantren atau lembaga pendidikan yang dinaunginya karena ruh kiai dan pesantren ialah kereligiusan serta penanaman nilai-nilai kebaikan. Dengan terikatnya pada politik maka ruh tersebut memudar secara perlahan karena praktik-praktik dalam politik yang cenderung bersifat dinamis. Menanggapi fenomena yang terjadi diperlukan kajian yang mengungkapkan kepribadian politik K.H Asep Maoshol seperti yang telah dijelaskan dalam penelitian yang berjudul “Politik Kebangsaan Kiai Pesantren: (Studi Kepribadian dan Perilaku Politik K.H.R Ach Fawaid As’ad Situbondo)” yang menghasilkan beberapa simpulan menggunakan perspektif psikologi guna memahami perilaku politik dengan mengungkapkan terdapat beberapa dimensi karakteristik kepribadian kiai fawaid, yakni dimensi neurotisme yang meliputi sabar dan ikhlas, dimensi ektraversion yang meliputi bersosialisasi, energik dan dominan, dimensi openness to experience yang meliputi artistik, terbuka pada ide-ide baru, menjunjung nilai-nilai kepesantrenan, dimensi agreeableness yang meliputi pemaaf dan khidmah dan dimensi conscientiousness yang meliputi disiplin, organisatoris dan taat agama. (Arifin, S & Wisri, 2019).

PEMILU atau yang disebut dengan Pemilihan umum kali ini akan digelar pada 14 Februari 2024 berdasarkan pada putusan Komisi Pemilihan Umum (KPU),

dalam pesta demokrasi nasional ini KPU menetapkan tiga pasangan calon, yakni Anies Baswedan & Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto & Gibran Rakabuming Raka dan Ganjar Pranowo & Mahfud MD sebagai calon presiden dan wakil presiden pada pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) kali ini. Selain itu juga, Komisi Pemilihan Umum telah merilis tahapan-tahapan Pemilu dimana didalamnya terdapat jadwal masa kampanye, yaitu pada 28 November sampai dengan 10 Februari 2024 atau terhitung 75 hari. Masa kampanye merupakan masa dimana masing-masing calon presiden dan wakil presiden menyampaikan gagasan atau visi misinya melalui program kerja yang ditawarkan dan juga sebagai ajang untuk memikat suara dengan terjun lebih dekat ke masyarakat (KPU.go.id, 2023).

Dilansir dalam liputan6.com (2023), pada tanggal 09/10/2023 Ganjar Pranowo selaku bacapres melakukan kunjungan ke pesantren Miftahul Huda yang bertujuan untuk memenuhi rangkaiannya serta bersilaturahmi dengan warga Tasikmalaya. Dalam pengakuan Ganjar dijelaskan bahwa kedatangannya sebagai upaya memenuhi janjinya untuk bertemu dengan UU Ruzhanul Ulum selaku sahabatnya disamping beliau juga merupakan cucu dari pendiri pesantren tersebut. Di samping itu juga, Mnctrijaya.com (2023) memberitakan bahwa Mahfud MD selaku cawapres dari Ganjar melakukan kunjungan ke pesantren Miftahul Huda pada tanggal 15/12/2023 sebagai upayanya untuk persiapan pemilihan presiden 2024 serta menyampaikan tujuannya yaitu kampanye politik yang membahas pembangunan Indonesia yang berbasis nilai-nilai keIslaman.

Selain itu, Prabowo Subianto juga menyambangi pesantren Miftahul Huda sebagaimana diberitakan oleh TribunPriangan.com (2023) bahwa kunjungan ini

sebagai kampanye politiknya dengan membagikan 7.000 paket makanan kepada para santri pesantren tersebut. Kunjungan Prabowo ke Tasikmalaya yang dilakukan pada tanggal 02/12/2023 ini juga ditemani bersama timnya dengan agenda bersilaturahmi bersama pemuka agama serta masyarakat. Pembagian paket makanan tersebut merupakan bentuk dari aktualisasi program kerja yang dibuat Prabowo yaitu paket makan siang dan susu gratis. Tidak ingin tertinggal, ternyata Anies Baswedan selaku capres juga menyambangi pesantren Miftahul Huda pada tanggal 04/01/2024 sebagaimana diberitakan dalam CNNIndonesia.com (2023) sebagai upaya kampanye politiknya dengan menyampaikan keinginannya kesetaraan dalam pendidikan karena menurutnya pesantren Miftahul Huda selalu peduli dalam persoalan kebangsaan. Tidak hanya itu, Ia juga menyampaikan harapan-harapannya serta memohon dukungan dalam momentum silaturahmi tersebut

Sebagai salahsatu pesantren yang telah berdiri sejak lama dan memiliki karakteristik terbuka pada politik berdasarkan pada catatan sejarah awal perkembangannya. Pesantren Miftahul Huda diketahui sebagai besar dan terkenal di Priangan timur serta memiliki cukup pengaruh maka tidak heran jika pesantren ini sering dijadikan objek strategis bagi para calon legislatif maupun para politisi untuk bersilaturahmi serta meminta doa dan restunya. Pada momentum masa kampanye ini, dari ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden telah melakukan safari serta kampanye politiknya ke pesantren-pesantren yang cukup terkenal di Tasikmalaya salah satunya ialah pesantren Miftahul Huda untuk bersilaturahmi serta meminta dukungan.

Kampanye politik atau kunjungan yang telah dilakukan oleh masing-masing calon presiden atau wakil presiden berjalan baik dengan antusiasnya masyarakat serta kehangatan yang diberikan dalam penyambutan oleh pihak pesantren Miftahul Huda yang sangat terbuka pada politik. Tetapi, terdapat momentum yang menarik pada kunjungan atau kampanye politik yang dilakukan oleh Pasangan Capres-Cawapres Ganjar-Mahfud MD. Meskipun keduanya melakukan kunjungan dalam rentan waktu yang berbeda, respon yang diberikan oleh pihak pesantren ternyata memiliki perbedaan. Seperti yang termuat dalam liputan6.com (2023) yang menyatakan bahwa kunjungan Ganjar sebagai upaya pemenuhan janji untuk bertemu dengan sahabat lamanya yakni UU Ruzhanul Ulum yang merupakan cucu dari pendiri Pesantren Miftahul Huda serta merupakan mantan wakil Gubernur Jawa Barat. Pertemuan keduanya dapat menimbulkan asumsi karena merupakan pimpinan daerah pada masa jabatan yang sama, tetapi mengapa memenuhi janji dilakukan pada masa kampanye Pilpres. Selain itu juga, kehadiran Mahfud MD mendapat sambutan cukup berbeda dari pihak pesantren khususnya K.H Asep sebagai pimpinan pesantren seperti yang dimuat dalam berita online DetikNews.com (2023) menyampaikan bahwa cawapres Mahfud MD mendapat sambutan baik dari pihak pesantren seperti pasangan calon lainnya dan juga mendapat pujian dari pimpinan pesantren Miftahul Huda. K.H Asep menilai bahwa Mahfud MD merupakan sosok yang paling mumpuni dalam penegakan reformasi hukum di Tanah Air serta menyampaikan kiasan bahwa Mahfud satu darah karena merupakan santri dan kiai.

Dalam jurnal yang berjudul “Political Influence of Kiai On Santri’s voting Behavioral at the 2019 Election” yang meneliti bagaimana perilaku kiai mempengaruhi perilaku memilih santri pada Pemilu 2019 di Pondok Pesantren Wisma Wisnu, Madiun. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa perilaku memilih kiai menunjukkan pada pilihan rasional karena dipandang mampu menilai kualitas, kompetensi dan integritas kandidat. Pada perilaku memilih santri menunjukkan pada pendekatan sosiologis dengan menilai atau mempertimbangkan pilihan berdasarkan arahan dari kiai dan orang tua mereka. Pengaruh yang diberikan kiai terhadap santri cenderung mengarah seperti hubungan paternalistik, artinya seperti hubungan ayah dan anak dimana santri mendapatkan kebebasan dalam menentukan pilihan tapi harus mengikuti mematuhi arahan. (Akhori, S. Supriyadi & Ahmad, Z., 2022).

Penelitian yang berjudul “Partisipasi Politik dan Perilaku Memilih Santri di Wilayah Nadlatul Ulama (NU) Lasem Kabupaten Rembang dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019”, meneliti mengenai partisipasi politik santri dan perilaku memilih santri NU Lasem pada Pilpres 2019. Hasil penelitian ini menunjukkan partisipasi politik santri tergolong cukup rendah jika dilihat pada keikutsertaan santri pada pendidikan dan diskusi politik, afiliasi dengan parpol dan partisipasi menjadi panitia pemilu. Sementara pada partisipasi penggunaan hak pilih tergolong tinggi, yakni sebesar 86,6%. Pengaruh arahan dari orangtua dan Kiai menjadi faktor dalam perilaku memilih santri dengan menggunakan pertimbangan rasional. (Muhammad, AA., Kushandajani & Rina, M., 2021).

Barokah dan Kurniawan (2024), dalam penelitiannya yang berjudul “Perilaku Politik Santri Pada PILKADA Lampung Selatan Tahun 2020: Studi Pada Pesantren Tradisional dan Pesantren Modern” menjelaskan bahwa perilaku politik santri pada kedua pesantren tersebut memiliki perbedaan. Adanya perbedaan perilaku politik santri dalam menentukan pilihan politik pada PILKADA didasarkan pada pertimbangan santri. Pada santri tradisional, pilihan politik didasarkan pada pengaruh yang besar oleh organisasi masyarakat/ormas dan partai yang diikuti kandidat. Selain itu juga, santri pada pesantren tradisional dikategorikan sebagai santri patuh mutlak yang akan mengikuti kiai dan cenderung tidak berani menentang titah kiai ataupun berbeda pilihan dengan kiai karena doktrin moral yang telah tertanam di pesantren. Disisi lain, pada santri pesantren modern, perilaku politik santri memperlihatkan modernisasi yang mengakibatkan terjadinya transisi cara berpikir tradisional ke modern. Artinya, pada santri pesantren modern tidak memiliki kecenderungan pada persamaan ormas, partai ataupun agama yang menjadi rujukan/dasar dalam menentukan pilihan politiknya. Santri pesantren modern dikategorikan sebagai santri prismatik yang berarti kiai tidak lagi berperan sebagai rujukan dalam menentukan pilihan politik serta mengikuti pilihan politik kiai tidak termasuk dalam esensi berkah.

Sebagai seorang yang menduduki dalam posisi sentral dan strategis di lingkup pesantren maupun masyarakat tentunya K.H Asep Affandy selaku pimpinan pesantren menjadi pusat perhatian santri-santrinya dan bahkan masyarakat sekitar dalam menanggapi kunjungan atau kampanye politik yang mendatangi pesantren yang dipimpinnya. Penerimaan serta penyambutan dalam

kunjungan politik yang dilakukan K.H Asep Affandy bukan berarti memberikan sinyal dukungan terhadap calon tersebut, justru sebagai penghormatan serta keterbukaannya pada politik. K.H Asep Affandy harus mampu menyesuaikan diri terhadap preferensi politiknya karena posisi beliau yang merupakan pimpinan pesantren dan juga seorang yang berlatar belakang sebagai politisi. Meskipun jika memposisikan diri sebagai politisi, jika dalam lingkup pesantren maka label pimpinan pesantren tidak akan hilang sehingga K.H Asep Affandy akan menjadi perhatian santri maupun masyarakat. Merujuk pada penelitian yang berjudul “Sosok Kiai Dalam Kontruksi Intelektual Muda Bangkalan” menjelaskan bahwa eksistensi kiai yang hadir ditengah masyarakat terdapat kiai yang dipandang dapat dijadikan teladan umat dan kiai yang tidak berada dalam bidangnya sebagai sosok seorang kiai. Kiai yang dapat dijadikan teladan umat atau disebut juga dengan kiai sebenarnya ialah kiai yang berfokus pada penguasaan ilmu agama, kiai agama/akhirat, kiai turunan yang memiliki kelakuan baik, dan kiai politik. Adapun sosok kiai yang tidak dalam ranahnya ialah seorang kiai yang mementingkan dan lebih mengedepankan kesenangan duniawi, sosok kiai ini dikenal dengan istilah kiai su’ atau kiai yang hanya menggunakan nama kiai guna mencapai keinginannya tanpa memperhatikan perannya dalam masyarakat dan menjadikan nama kiai sebagai topeng semata. (Kamilah, ST dan Jatiningsih, 2017)

Berdasarkan pada data hasil rekapitulasi suara pada pemilihan presiden tahun 2024, Kecamatan Manonjaya memiliki 12 Desa dengan jumlah pengguna hak pilih 39.897 orang. Pesantren Miftahul Huda berada di desa Kalimanggis dan terdapat 3 desa yang berada cukup dengan pesantren yakni Desa Pasir Panjang,

Manonjaya dan Margarahayu. Adapun hasil rekapitulasi hasil suara dari keempat desa yang berada dekat dengan pesantren Mifathul Huda adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Rekapitulasi hasil Pilpres 2024

No	Nama Desa	Jumlah Hasil Rekapitulasi Suara Pilpres 2024		
		Anies B & Muhaimin I	Prabowo & Gibran	Ganjar P & Mahfud MD
1.	Kalimanggis	1.978	1.938	299
2.	PasirPanjang	1.452	1.581	262
3.	Manonjaya	1.476	1.630	250
4.	Margarahayu	909	1.508	196
Total		5.815	6.657	1.007

Sumber: KPU.go.id

Tabel diatas menunjukkan data hasil rekapitulasi suara pada Pilpres 2024 dimana perolehan suara dari paslon Anies-Muhaimin dan Prabowo-Gibran memiliki selisih yang tidak terlalu jauh. Tetapi, perolehan suara pada paslon Ganjar-Mahfud justru sangat rendah dibandingkan paslon lawannya. Hal ini cukup menimbulkan pertanyaan dimana K.H Asep ini merupakan pimpinan pesantren Mifathul Huda juga seorang politisi dari Partai Persatuan pembangunan serta merupakan koalisi dari paslon Ganjar-Mahfud tapi perolehan suara dari paslon ini sangat rendah. Dengan demikian, kecenderungan K.H Asep Affandy terhadap salah satu paslon dalam sebuah momentum atau lingkup pesantren, apakah para santri maupun masyarakat akan mengikutinya? Meskipun berdasarkan pada peraturan dalam berkampanye tidak diperkenankan melakukan kampanye politik dalam pesantren atau tempat pendidikan, tapi bagaimana dengan upaya-upaya yang

dilakukan melalui aktivitas sehari-hari yang memiliki maksud dalam menentukan perilaku politik atau mengarahkan pada upaya untuk memilih salah satu paslon? Apapun yang dilakukan oleh kiai yang dianggap baik akan dipandang sebagai contoh dan perlu ditaati oleh para santrinya, yang menjadi pokok bahasan adalah apabila para santri keliru dalam menafsirkan apa yang dilakukan kiai, dalam hal ini menyangkut dengan kedekatan yang terbangun antara kiai dengan salah satu paslon yang kemudian dinilai sebagai arahan yang terbangun secara hubungan emosional. Sehingga dapat menimbulkan asumsi tentang bagaimana para santri menanggapi atau merespon fenomena yang terjadi dalam menentukan perilaku memilih pilihan politiknya pada pilpres 2024?’

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diambil adalah:

1. Adakah pengaruh perilaku politik Kiai pesantren Miftahul Huda Manonjaya terhadap perilaku memilih santri pada pilpres 2024?
2. Seberapa besar pengaruh perilaku politik Kiai pesantren Miftahul Huda Manonjaya terhadap perilaku memilih santri pada pilpres 2024?

1.3 Batasan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diambil maka diperlukan pengambilan batasan masalah untuk membatasi penelitian agar ruang lingkup penelitian tidak terlalu luas, dalam penelitian ini memiliki batasan pada pesantren yang menjadi objek penelitian yaitu pesantren Miftahul Huda pusat yang berlokasi di Kampung

Kalimanggis serta memfokuskan penelitian pada santri yang sedang menempuh pada tingkatan Tsanawy.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini:

1. Mengetahui pengaruh Kiai Pesantren Miftahul Huda terhadap perilaku memilih santri pada Pilpres 2024
2. Mengetahui besaran Kiai pesantren Miftahul Huda dalam memberikan pengaruh terhadap perilaku memilih santri atau masyarakat umum dalam pilpres 2024

1.5 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini peneliti dapat memberikan manfaat dalam dua aspek:

1.5.1 Aspek Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi peneliti dan dapat menjadi bahan rujukan dalam keilmuan yang berkaitan dengan pengaruh perilaku politik kiai terhadap perilaku memilih santri serta dapat memberikan pandangan terhadap ilmu pengetahuan

1.5.2 Aspek Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta pemahaman kepada khalayak terhadap pengaruh perilaku politik kiai terhadap perilaku memilih santri